

Penanganan Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi di Media Sosial

PERWITA SUCI

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Internasional Indonesia

E-mail: perwita.suci@uiii.ac.id

Abstrak

Problematika ujaran kebencian di Indonesia semakin merayap, menciptakan tantangan kompleks dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, terutama melalui media baru. Saatnya bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat melalui new media, namun realitasnya seringkali tidak sesuai harapan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi berkembang di media sosial dan bagaimana penanganannya oleh Tim Komunikasi Presiden (TKP) serta Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus mendalam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori konvergensi simbolik Ernest Boorman digunakan untuk memahami pertukaran pesan yang mempengaruhi pemahaman kolektif. Konsep ujaran kebencian, media sosial, dan netizen juga digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa TKP dan KSP merespons ujaran kebencian dengan memberikan kontra narasi dan klarifikasi kepada publik melalui media mainstream dan sosial. Mereka juga berperan dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai kebijakan pemerintah dan situasi di lingkungan istana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan dilakukan melalui klarifikasi langsung oleh presiden serta penyampaian kontra narasi melalui media sosial atau konferensi pers oleh KSP. Ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas pemerintahan dan meminimalkan dampak negatif dari ujaran kebencian.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Tim Komunikasi Presiden (TKP), Kantor Staf Presiden (KSP), Media sosial

Abstract

The issue of hate speech in Indonesia is increasingly pervasive, posing complex challenges in the relationship between the government and the people, especially through new media channels. It is time for the government to establish harmonious communication with the public through new media, yet the reality often falls short of expectations. In this context, this research aims to understand how the phenomenon of hate speech against President Jokowi develops on social media and how it is addressed by the Presidential Communication Team and the Executive Office of the President. These research employs a qualitative approach with an in-depth case study. Data is gathered through observation, interviews, and documentation. Ernest Boorman's theory of symbolic convergence is utilized to comprehend the exchange of messages that influence collective understanding. Concepts of hate speech, social media, and netizens are also incorporated. The analysis reveals that the Presidential Communication Team and the Executive Office of the President respond to hate speech by providing counter-narratives and clarifications to the public through mainstream and social media channels. They also play a role in disseminating accurate information regarding government policies and the situation within the presidential palace. The research concludes that handling is carried out through direct clarification by the president and the delivery of counter-narratives via social media or press conferences by the Presidential Staff Office. These are steps taken to uphold the integrity of the government and minimize the negative impact of hate speech.

Keywords: Hate Speech, Presidential Communication Team, Executive Office of the President, Social Media

CoverAge

Journal of Strategic
Communication

Vol. 14, No. 1, Hal. 146-165

Maret 2024.

Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pancasila

Accepted October 31, 2023

Revised February 2, 2024

Approved March 4, 2024

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, proses komunikasi manusia mengalami revolusi yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya internet sebagai *new media* (media baru). Internet membuat manusia dapat berkomunikasi tanpa terhalang jarak dan waktu. Lambat laun, pengguna jasa internet di Indonesia semakin banyak. Berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam data pengguna internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa, mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta jiwa (APJII, 2018). Mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, pada 2017 sangat jelas terlihat kejahatan yang merupakan dampak dari kemudahan berselancar di media sosial. Sampai pada akhirnya melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017, POLRI membentuk unit khusus untuk menumpas kejahatan di dunia maya, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Patrolisiber.id, 2017). Hal ini dilakukan karena kejahatan di dunia maya semakin banyak dan dianggap membutuhkan tim khusus untuk menanggulangnya.

Beragam kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan oleh internet, membuat banyak manusia kehilangan kontrol atau pun kendali sosial. Terbukti dengan maraknya pelanggaran UU ITE di Indonesia. Salah satu pelanggaran UU ITE dialami oleh Prita Mulyasari pada tahun 2009 silam. Ibu dari dua anak tersebut harus merasakan tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang karena tersebarnya surat elektronik yang ia tulis tentang pelayanan rumah sakit Omni Internasional Alam Sutera. Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah sakit tersebut (Lusiana, 2019; Estaswara, 2011). Amnesty Internasional Indonesia menilai kehadiran media sosial memiliki dua sisi dalam hal melahirkan pimpinan. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa tahun belakangan ini. Ada sisi terang dan juga sisi gelapnya (Sukmana, 2018). Sisi terang yang dimaksud dapat dibuktikan dengan peran media sosial atas terpilihnya Joko-

wi sebagai residen dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Kala itu, Tim sukses Jokowi menggunakan media sosial sebagai media kampanye yang efektif, salah satunya adalah Jokowi Ahok Social Media Volunteers atau dikenal sebagai JASMEV. JASMEV merupakan tim sukses pemenangan Jokowi dan Ahok pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Hal serupa juga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan menggalang tim pemenangan berbasis anak muda yang mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022 dengan berkampanye menggunakan situs Teman Ahok.com (Tempo.co, 15 Maret 2016).

Namun, hal tersebut berbanding terbalik di tahun 2017. Kini media sosial lebih banyak bermuatan konten ujaran kebencian, terlebih saat pilkada DKI Jakarta 2017 silam (Kominform.go.id, 2017). Pada masa pilkada DKI, dapat kita lihat banyak sekali kasus mengenai ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada Ahok, karena Ahok dianggap melakukan penistaan Agama (Tiurina, 2018). Bukan hanya itu, media sosial pun membuat demo bela agama menjadi hal yang tidak akan pernah habis diperbincangkan (Jubba, 2020). Ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada Ahok salah satunya bersumber dari musisi Indonesia, yaitu Ahmad Dhani (CNN Indonesia, 30 Desember 2019). Dalam akun Twitter pribadi miliknya, dia menulis "*Yang menistakan agama Ahok... yang diadili KH. Ma'ruf Amin*" (tulisan ini diunggah di akun Twitter pribadi Ahmad Dhani pada 7 Februari 2017).

Kasus ujaran kebencian lainnya pun terus mengikuti perkembangan isu-isu yang sedang terjadi. Seperti kasus Ropi Yatsman yang melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi (Kompas.com, 25 Juli 2017). Ropi merupakan salah satu warga Negara Indonesia yang tinggal di Bukit Tinggi, Padang. Ropi mengunggah konten penghinaan melalui akun Facebook miliknya. Selain itu, Ropi juga mengedit sejumlah foto pejabat negara, termasuk mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ropi membuat gambar Presiden Jokowi seolah-olah dimasukkan ke dalam kantong plastik sehingga terlihat kepa-

lanya saja. Setelah itu dia menuliskan *caption* “*punya presiden tidak berguna? Jual saja di tokobagus.co*”. Atas perbuatannya ini, Ropi divonis 15 bulan penjara (Sukmana, 2018).

Keluasan serta keterbukaan yang menjadi karakter utama dari sosial media membuat para pengguna terkadang tidak memahami batasan-batasan yang seharusnya tidak mereka lewati. Dengan keluasan serta kebebasan berselancar di media sosial, seseorang dapat dengan mudah mengutarakan ekspresinya, dan terkadang menimbulkan beberapa efek negatif. Salah satunya yang terlihat jelas adalah hadir dan meningkatnya intensitas ujaran kebencian.

Kasus mengenai ujaran kebencian kerap kali terjadi di Indonesia. Dengan alasan kebebasan berekspresi di media sosial bukan berarti tidak ada batasannya. Indonesia sebenarnya sudah punya aturan tersendiri mengenai ujaran kebencian di sosial media yang termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE (Kominfo, 2016). Beragam kasus mengenai ujaran kebencian kerap muncul mewarnai dinamika sosial media masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu tragedi mengenai pembakaran masjid di Tolikara pada tahun 2015 sampai kasus yang menyangkut mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2017 silam telah banyak beredar di media sosial (Kompas.com). Belum lama ini, ujaran kebencian telah sampai kepada tataran orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi

Kebebasan berekspresi di dunia maya, membuat seorang pelajar SMK di Medan, Muhammad Farhan Balatif, ikut-ikutan menghina Presiden Jokowi melalui akun Facebook pribadinya yang menggunakan nama samaran Ringgo Abdillah. Selain menghina Jokowi, pelajar ini juga menghina institusi POLRI. Dalam akun Ringgo Abdillah menulis status “*apakah menghina Jokowi termasuk tindakan kejahatan? Tidak, karena UU ITE hanya omong kosong, toh gw masih aman*” (Detiknews, 20 Agustus 2017). Status pelajar tidak cukup membuat dirinya memahami batasan berekspresi di media sosial. Nampaknya status sebagai mahasiswa pun tak bisa membuat

Dodik Ikhwanto lebih bijak menggunakan media sosial. Dodik mengunggah konten ujaran kebencian terhadap Iriana (istri Presiden Jokowi) (Tempo, 13 September 2017). Konten yang diunggah berupa gambar (meme) disertai komentar dengan kata-kata yang tidak lazim ditujukan pada Iriana. Dalam gambar yang dibuatnya, terdapat gambar Iriana yang sedang melambaikan tangan dan menggunkan hijab, lalu di atasnya terdapat tulisan “*Ibu ini seperti pelacur, menggunakan hijab hanya untuk menutup aib (bukan karena iman)*”, dan terdapat tulisan “*Coming Soon 2019*” di bawah foto tersebut (Facebook.com). Dodik mengaku mengunggah gambar tersebut lantaran kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Pelaku ditangkap oleh jajaran Polrestabes Bandung pada 11 September 2017 (Kompas.com, 13 September 2017)

Posisi istana kerap kali dijadikan sasaran ujaran kebencian. Dalam beberapa kasus belakangan ini, semakin banyak *netizen* yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengomentari istana (Ishartanto, 2021). Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan anggota staff istana lainnya sering menjadi bahan ujaran kebencian. Semestinya posisi istana bukan menjadi bahan empuk sasaran ujaran kebencian. Namun dengan adanya kebebasan dalam penggunaan media sosial, kini bukan hal yang tidak mungkin istana selalu menjadi sorotan publik.

Tentu bukan hal yang asing lagi di telinga ketika disebut nama Jonru Ginting. Jonru Ginting memulai aksi perlakuan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di akun sosial media miliknya (CNN Indonesia, 23 November 2018). Jonru acap kali melakukan tindakan ujaran kebencian di akun media sosialnya. Tentu saja hal semacam ini membuat para pengguna internet lainnya merasa tak nyaman. Belum habis kasus Jonru, datang lagi ujaran kebencian terhadap presiden RI dari seorang musisi anah air, yaitu Ahmad Dhani (CNN Indonesia, 30 Desember 2019). Seperti tak habis-habisnya presiden RI mendapatkan ujaran kebencian dari rakyatnya sendiri. Problematika ujaran kebencian di Indonesia kini semakin menjadi-jadi. Perihal banyak yang mengomentari para pejabat di tanah air.

Warga merasa media sosial adalah suatu alat komunikasi yang tepat digunakan untuk berekspresi dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat banyak (Azmi, 2022). Semestinya proses komunikasi antara para pejabat di Indonesia dan rakyat dapat terjalin harmonis dengan munculnya *new media*. Namun hal yang terjadi tidak semulus yang diharapkan. Media sosial malah dijadikan alat untuk mencela para pejabat di tanah air, dan menimbulkan kesalahpahaman antara dua belah pihak.

Dengan latarbelakang seperti dipaparkan sebelumnya, dapat dijadikan peneliti sebagai argumentasi, mengapa kasus ini diangkat dan dijadikan sebuah penelitian penting yang berjudul: "Penanganan Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi di Media Sosial oleh Tim Komunikasi Presiden dan Kantor Staf Presiden RI."

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konvergensi Simbolik

Teori konvergensi simbolik merupakan salah satu riset yang diilhami oleh Robert Balles mengenai komunikasi dalam kelompok kecil, yang kemudian direplikasi dalam tindakan komunikasi masyarakat dalam skala yang lebih luas ketimbang kelompok kecil (Suryadi, 2010). Konvergensi merupakan suatu cara di mana dunia simbol antar individu dapat saling bertemu, saling mendekati bahkan saling berhimpitan. Sementara simbolik merupakan suatu kecenderungan manusia dalam menafsirkan sesuatu dan menanamkan makna terhadap suatu lambang. Ketika digabungkan antara konvergensi dan simbolik dapat dikatakan sebagai cara individu dalam menafsirkan makna dari suatu lambang yang diterimanya (Boorman, 1983)

Teori konvergensi simbolik adalah suatu teori umum dalam kerangka luas yang memperhitungkan komunikasi manusia dalam hal *homo narrans* (makhluk pencerita). Teori ini menjelaskan mengenai munculnya kesadaran kelompok, dengan emotikon, motif, dan makna yang disertai secara tersirat, bukan dalam hal lamunan dan skrip individu, tetapi lebih kepada istilah-istilah, yang secara sosial disebut sebagai narasi fantasi. Dengan demikian ini termasuk sebagai

teori komunikasi sosial (Bormann, 1983).

Teori konvergensi simbolik yang dipelopori oleh Ernest Bormann menjelaskan tentang proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya makna, motif, dan juga persamaan bersama. Kesadaran kelompok yang terbangun dalam suatu kelompok dapat membangun semacam makna, motif untuk bertindak bagi orang-orang dalam kelompok tersebut (Heryanto, 2018).

Teori ini memiliki anggapan dasar bahwa setiap anggota kelompok melakukan pertukaran fantasi dalam rangka membentuk kelompok yang kohesif. Fantasi yang dimaksud merupakan ide ataupun gagasan, cerita, gurauan, dan lain-lain yang mengandung emosi atau mengungkapkan emosi. Teori ini mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok dan berimplikasi pada hadirnya makna, motif dan perasaan bersama. Kesadaran simbolik yang terbangun dalam proses tersebut akan menyajikan makna, emosi dan motif untuk bertindak bagi kumpulan individu yang terlibat didalamnya (Heryanto, 2018).

Ada beberapa asumsi dari Ernest Bormann (1983) tentang teori konvergensi simbolik, diantaranya:

- a. Bormann menyatakan bahwa teorinya dibangun dalam kerangka paradigm naratif yang meyakini bahwa manusia merupakan *homo narrans*, yakni makhluk yang saling bertukar cerita atau narasi untuk pengalaman dan realitas sosialnya;
- b. Bormann menyatakan bahwa teori ini adalah teori umum yang mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok, yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif dan perasaan bersama;
- c. Bormann mengartikan istilah konvergensi sebagai suatu cara di mana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu menjadi saling bertemu, saling mendekati, atau kemudian saling berhimpitan. Sedangkan istilah simbolik terkait dengan kecenderungan manusia menafsirkan makna dari berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah terjadi,

atau tindakan yang dialami manusia;

- d. Menggunakan simbol yang hanya dipahami oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu.

Menurut Ernest Bromann (1983) ada kata lain yang dapat menggambarkan proses konvergensi simbolik yaitu tema fantasi. Maksud dari tema fantasi merupakan suatu pesan yang didramatisasi dengan menggunakan permainan kata yang dapat menimbulkan interaksi dalam suatu kelompok. Masing-masing individu dapat menyalurkan fantasinya karena kesamaan pengalaman atau seseorang dapat mendramatisasi pesan dengan baik. Konvergensi simbolik dapat terjadi ketika sekumpulan individu baik yang sudah lama dikenal ataupun yang baru dikenal, mereka melakukan interaksi dan saling bertukar pengalaman yang sama. Konvergensi simbolik berkaitan dengan respon kelompok Ernest Bormann mengatakan bahwa kita dapat melihat reaksi berantai oleh peningkatan energi di dalam grup, dalam tempo yang tidak terlalu cepat dalam percakapan terutama melalui tanggapan umum terhadap citra (Griffin, 2003).

Tema fantasi adalah bagian dari drama atau cerita besar yang lebih panjang dan lebih rumit yang dinamakan “visi retorik,” yaitu suatu pandangan bagaimana sesuatu itu terjadi atau terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pandangan ini membentuk pemikiran atau asumsi yang menjadi dasar pengetahuan bagi suatu kelompok manusia yang mengatur rasa terhadap realitas (*sense of reality*). Visi retorik tidak pernah diceritakan secara keseluruhan, tetapi dibangun secara bertahap dengan cara menceritakan tema-tema fantasi yang saling berhubungan. Agar dapat memahami secara keseluruhan, seseorang harus mendengarkan setiap rangkaian tema-tema fantasi yang diceritakan (Morissan, 2013).

Konseptualisasi Media Sosial

Media merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat global. Hampir sebagian besar masyarakat dunia melakukan komunikasi melalui media. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, media menjadi suatu alat yang

sangat digandrungi masyarakat untuk berkomunikasi. Definisi media sosial menurut Kaplan dan Haenlein (2010) adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan terjadi penciptaan dan pertukaran yang dihasilkan dari pengguna konten (Kaplan & Haenlein, 2010).

Penggunaan media sebagai alat komunikasi manusia semakin lama kian meningkat, terlihat dari data yang dikeluarkan oleh APJII per-tahun 2017 di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sebagai alat bantu mereka dalam berkomunikasi (APJI, 2017).

Media sosial dapat diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Sehingga satu hal yang wajar ketika seseorang menjadikan media sosial sebagai tempat berekspresi dan berkarya secara bebas tanpa batasan. Meskipun banyak kesamaan antara media sosial dan media siber, namun ada perbedaan diantara keduanya. Di mana ada beberapa karakteristik dari media sosial yang tidak dimiliki oleh media siber. Berikut adalah karakteristik dari media sosial (Nasrullah, 2015):

a) Jaringan (*Network*) Antar Pengguna

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. Jaringan yang dimaksud sebagai karakteristik media sosial adalah media sosial pada dasarnya terbentuk dari sistem yang berjejaring atau manusia yang saling terkoneksi dengan bantuan teknologi.

b) Informasi

Informasi dapat dikatakan sebagai entitas penting dalam media sosial. Sebab tidak se-

perti media lain di internet, pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan informasi berdasarkan informasi. Bahkan informasi menjadi semacam komoditas dalam masyarakat informasi. Informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi yang menjadikan suatu informasi tersebut bernilai.

c) Arsip

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa pun. Arsip juga merupakan salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial. Dengan mudahnya seseorang yang menyimpan data di media sosial, dapat mengunggahnya lagi atau melihatnya lagi kapan saja. Setiap informasi yang diunggah tidak akan hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan maupun tahun.

d) Interaksi

Secara sederhana, interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda-tanda yang ada di media sosial. Seperti halnya ketika kita melihat seseorang mengunggah foto, kita bisa berinteraksi dengan orang tersebut dengan cara memberikan *like* atau pun komentar.

e) Simulasi Sosial

Dalam pemahaman simulasi, dapat dilihat dari karya Jean Baudrillard yang membahas mengenai *simulations and simulacra* (Nasrullah, 2015). Jean Baudrillard (1994) mengungkapkan makna simulasi bahwa kesadaran yang nyata di benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya imaji yang disajikan media secara terus-menerus. Khalayak seolah tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang ada di layar kaca. *Term* simulacra digunakan oleh Baudrillard untuk menggambarkan bagaimana realitas yang ada di media merupakan ilusi, atau dalam kata lain sesuatu yang ada di media adalah bukan cerminan dari suatu realitas,

sebuah penandaan yang tidak lagi mewakili tanda awal, tetapi sudah menjadi tanda baru. Di dalam media sosial, interaksi yang terjadi memang menggambarkan bahkan mirip sekali dengan realitas yang ada, akan tetapi sebenarnya yang terjadi hanyalah simulasi dan bahkan terkadang berbeda sekali dengan realitasnya.

f) Konten Oleh Pengguna

Hal yang menjadi basis dari media sosial adalah kekayaan informasi, karena setiap individu berhak mengunggah informasi apa pun. Oleh karena itulah *term* ini menunjukkan bahwa setiap konten di media sosial sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi masing-masing individu atau pemilik akun.

g) Penyebaran

Penyebaran merupakan karakter lainnya dari media sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini menunjukkan bahwa khalyak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya.

Konseptualisasi *Netizen*

Netizen bukan hal baru lagi di telinga masyarakat abad ke-21. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *netizen* atau yang kini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai warganet. Warganet adalah seseorang pengguna internet yang aktif terlibat dalam komunitas *online* internet. Aktivitas yang dilakukan pun beragam. Mulai dari sekedar *chatting* sampai mencari informasi terkini. Istilah *netizen* pertama kali dipopulerkan oleh Michael F Hauben (1993). Dalam buku *The Net and Netizens: the Impact the Net Has on People's Lives*. Pada tahun 1990, Michael (Hauben, 1993) sudah memprediksikan bahwa internet merupakan suatu perkembangan yang baru dan sangat signifikan serta sudah dapat dipastikan, internet akan sangat berdampak bagi dunia kita.

Pada awal kalimat bukunya, Michael (1993) mengungkapkan Selamat datang di abad 21. Anda adalah seorang *netizen* (seorang warganet) dan anda ada sebagai warga dunia berkat konek-

tivitas global yang disediakan oleh internet. Anda menganggap bahwa setiap orang adalah rekan satu negara. Anda secara fisik tinggal di satu negara tetapi anda berhubungan dengan sebagian besar dunia dengan jejaring komputer global. Sebenarnya anda tinggal bersebelahan dengan setiap warga net lainnya di dunia. Pemisahan geografis diganti dengan keberadaan di ruang virtual yang sama” (Hauben, 1993).

Dijelaskan dalam bukunya (Hauben, 1993) mengatakan bahwa orang-orang yang ada di abad ke-21 adalah seorang *netizen*. Karena pada abad ini, semua akses informasi maupun komunikasi bergantung pada internet. Lebih lanjut, dirinya berargumen bahwa setiap manusia tergabung dalam komunitas global berjejaring. Artinya jarak geografis sudah bukan lagi menjadi alasan penghambat komunikasi. Sehingga dapat diartikan bahwa sesama warganet, tinggal berdampingan dan terasa sangat dekat.

Menjadi *netizen* sudah pasti menjadi bagian dari kegiatan media di mana seseorang terikat dengan informasi yang termediasi. Kegiatan media yang dimaksudkan dapat berupa proses menghimpun, memproduksi, sampai mendistribusikan informasi. *Netizen* secara fisik, mental dan emosional terlibat dalam material, teknologi, bahkan struktur kekuatan yang ada di dalam media sosial. Ada beberapa asumsi mengenai *netizen* menurut para ahli, menurut Windahl, Signitzer dan Olson (1992), *netizen* cenderung dilekatkan kepada individu yang dengan kesadarannya memilih pesan yang tersedia di dalam media sosial. Sementara menurut Mc Quail, pengertian netizen ditambahkan bahwa *netizen* juga merupakan target dalam suatu produksi pesan (Nasrullah, 2015).

Konseptualisasi *Hate Speech*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2019), benci dapat diartikan sangat tidak suka, sedangkan kebencian itu sendiri merupakan kata benda yang berarti perasaan sangat tidak suka. Dalam era sekarang, kebebasan berpendapat sudah menjadi hak bagi setiap orang. Setiap individu dapat bebas berekspresi di media sosial. Semenjak hadirnya kebebasan di

media sosial, maka mulai dikenal kata ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial, di mana seseorang tanpa beban dapat menghina atau pun mengejek orang yang tidak ia sukai di media sosial, bahkan sampai bisa melakukan pencemaran nama baik.

Menurut Kent Greenawalt (Heryanto, 2017) *hate speech* merupakan ucapan dan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan dan orientasi seksual. Ujaran kebencian memiliki tujuh komponen sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ujaran kebencian diantaranya: pernyataan penghinaan, pencemaran nama baik, pembohongan publik, memprovokasi, penistaan, penghasutan dan kebencian.

Menurut UNESCO (2016), ujaran kebencian merujuk pada ekspresi hasutan untuk menyakiti (khususnya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan) dengan sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, ujaran kebencian dapat berupa perkataan yang membela, mengancam atau pun mendorong tindakan kekerasan. Ujaran kebencian dapat mencakup pesan kebencian atau pun ekspresi yang menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi yang diasumsikan menjadi pemicu terjadinya diskriminasi, permusuhan dan serangan kekerasan.

Pada waktu tertentu, ujaran kebencian cenderung meluas dan bahkan mencakup penginaan terhadap seorang penguasa atau individu yang menjadi sorotan publik. Hal ini akan banyak terlihat dalam masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif, atau pun pemilihan presiden.

Rita Kirk Whillock (1994) dalam esainya yang berjudul “*Ethical Considerations of Civil Discourse: The Implication of The Rise of Hate Speech*” menyebut bahwa pesan kebencian pada hakikatnya merupakan “*annihilus retoris*” terhadap lawan. Meskipun hanya melalui kata-kata, pesan kebencian itu bertujuan untuk menidakan atau mematikan lawan. Akibatnya, dialog atau diskursus menjadi macet. Tidak adanya kesedia-

an untuk menghargai dan mendengarkan lawan bicara. Tak ada kesediaan untuk terbuka belajar dan berubah.

Persoalan ujaran kebencian di media sosial juga membuat MUI mengeluarkan fakta mengenai larangan melakukan ujaran kebencian (Kominfo, 7 Juni 2017). Hal tersebut dikarenakan ujaran kebencian memang tidak diperbolehkan/dilarang dalam agama Islam. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial ini akhirnya diluncurkan atas dasar keprihatinan dari maraknya ujaran kebencian serta permusuhan antar sesama warga negara Indonesia di media sosial (MUI, 2017).

Menurut Gagliardon (2015) ada beberapa karakteristik ujaran kebencian di ranah *online*, yaitu:

1. Kekekalan Pesan

Di ranah *online*, pesan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dalam format yang berbeda yaitu dapat berupa lintas *platform* dan dapat diulang melalui tautan (*link*). Arsitektur *platform* akan berpengaruh pada berapa lama pesan bertahan. Misalkan pada Twitter ada yang disebut *trending topic*, hal ini menggambarkan bagaimana suatu pesan cepat tersebar, menjadi pembicaraan global, namun tak lama usianya.

2. Pengembaraan Pesan

Pesan dalam ranah media *online* yang sudah dihapus bahkan bisa dimunculkan kembali, baik dengan judul yang sama dan *website* yang sama atau pun sebaliknya. Pesan dalam media *online* memang dapat dibangkitkan kembali dengan mudah. Ketika kita men-*download* suatu artikel, lalu tiba-tiba di *website*-nya artikel tersebut sudah dihapus, maka kita bisa meng-*upload* kembali di *website* kita pribadi.

3. Anonimitas

Dalam kondisi *anonym*, seseorang akan lebih merasa nyaman dan aman untuk menyebarkan ujaran kebencian dengan menggunakan nama palsu. Biasanya seseorang akan menggunakan akun palsu untuk me-

lakukan tindakan penyebaran ujaran kebencian di media sosial, agar identitasnya terlindungi dan tidak terjerat hukum.

4. Transnasionalitas

Pesan dalam media *online* dapat dengan mudah menyebar lintas negara. Kita sadari sepenuhnya bahwa pesan atau pun tautan yang ada di media *online*, otomatis akan menyebar keseluruh penjuru dunia. Apa pun yang kita unggah di suatu negara dapat langsung diakses pada saat yang bersamaan di negara yang berbeda. Pesan tersebut akan memunculkan persoalannya sendiri, misalnya terkait mekanisme hukum untuk mengatasinya.

METODE

Dijelaskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Guba (Gunawan, 2013), konstruktivisme ialah: *it depicts knowledge as the outcome or consequences of human activity: knowledge is a human construction, never certifiable as ultimately true but problematic is never changing*. Paradigma ini berpendapat bahwa setiap aktivitas manusia merupakan konstruksi realitas, dan hasilnya bukanlah sesuatu hal yang tetap, cara melihat fenomena yang terjadi dalam berbagai sudut pandang dan kemampuan dialektika saat mencari informasi. Sehingga dapat mengungkap apa sebenarnya maksud dari fenomena yang terjadi dengan menekankan studi kasus sebagai fokus analisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus peneliti berusaha menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dianalisa demi mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan konsep studi kasus yang dibatasi pada studi kasus interinsik (Crowe, 2011). Di mana peneliti ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu, yakni mengenai ujaran kebencian. Hal ini dilakukan karena dalam kasus ini terdapat kekhususan tersendiri mengenai suatu fenomena (Gerring, 2004). Peneliti akan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus uja-

ran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Tim Komunikasi Presiden (TKP) dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang menangani kasus ujaran kebencian terhadap presiden di media sosial. Sedangkan yang menjadi objek Penelitiannya adalah ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi yang merupakan fenomena baru di media sosial dan sedang ramai diperbincangkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Dokumentasi, penulis mencari sumber informasi melalui penelaahan foto dari akun Facebook pihak yang bersangkutan. Tehnik dokumentasi ini digunakan untuk menunjang data penelitian. (2) Observasi, dalam Penelitian ini penulis melakukan pengamatan teks. Penulis melakukan analisis terhadap penanganan yang dilakukan oleh TKP dan KSP terhadap ujaran kebencian terhadap Jokowi. Selain itu, penulis juga berusaha untuk mendatangi Istana Negara untuk melihat dan mencermati lebih dekat penanganan Tim Komunikasi Presiden dan Kantor Staf Presiden dalam menanggapi hal ini. (3) Wawancara mendalam, untuk melengkapi data, penulis melakukan tanya jawab/ wawancara kepada tim komunikasi Presiden Jokowi dan Staf Kepresidenan yang bertugas memberikan penanganan terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial (Denzin & Lincoln, 2009).

Demi mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi maka peneliti melakukan pengumpulan data hingga peneliti mencapai titik jenuh (*redundant of data gathering*) dan memperdebatkan prosedur-prosedur penjelasan. Setelah semua informasi atau pun data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif dengan pisau analisis teori konvergensi simbolik untuk menjawab permasalahan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Ujaran Kebencian di Facebook

Sistem kebebasan berbicara bagi seluruh masyarakat di Indonesia memang termaktub dalam undang-undang. Setiap masyarakat bebas mengeluarkan pendapatnya di dalam ruang publik

yang sudah tersedia. Namun, nampaknya kebebasan berpendapat ini banyak disalah-gunakan oleh sebagian orang hingga muncul suatu studi akademis mengenai ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah perkataan atau pun tulisan seseorang yang dibuat di muka umum yang bertujuan untuk menyebarkan dan menyulut kebencian terhadap orang lain atau pun kelompok yang berbeda pendapat, ras, suku, agama, keyakinan, gender, dan sebagainya (Heryanto, 2017). Fenomena ujaran kebencian mendapat perhatian di Indonesia karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia membuat aturan mengenai ujaran kebencian yang tertuang dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UU ITE.

Namun, adanya UU ini belum juga membuat kebencian di media sosial. Sifat peraturan yang pasif membuat hukum di Indonesia terlihat tidak tegas. Hal ini dikarenakan hukum akan bisa dilaksanakan ketika ada seseorang yang merasa dirinya atau orang lain yang telah dirugikan melapor kepada pihak penegak hukum. Jika dilihat dari rentang waktunya, perbincangan ujaran kebencian di media sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika kejadian yang disajikan oleh beragam golongan. Selain itu, ujaran kebencian ujaran terhadap presiden juga dipengaruhi oleh kegiatan atau pun keputusan yang dibuat oleh presiden Jokowi.

Saat mengklarifikasi hal tersebut, Johan Budi (2018) berargumen bahwa "Ya, kalau sampai saat ini memang banyak sekali ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden Jokowi. Memang biasanya ujaran kebencian itu muncul setelah bapak melakukan suatu kegiatan atau pun membuat keputusan. Terlebih lagi sekarang, tahun 2018 dan memasuki tahun politik, dapat dilihat ujaran kebencian semakin melonjak."

Seperti halnya ujaran kebencian yang menerpa Presiden Jokowi soal banyaknya tenaga kerja asing terutama China yang berada di Indonesia, isu ini sangat cepat tersebar melalui media sosial, dan membangun pola pikir masya-

rakat bahwa presiden Jokowi membuka peluang bagi tenaga kerja asing yang terlalu banyak. Selain itu, rumor mengenai kebangkitan PKI di era Jokowi pun merambah, bukan hanya itu, Presiden Joko Widodo pun mendapatkan julukan sebagai antek-antek PKI. Beberapa rumor terus tersebar di media sosial yang tak henti menghantam Presiden Republik Indonesia, bahkan sampai mencuat di Facebook ucapan mengenai orang tua Jokowi, yang tidak jelas asal usulnya. Presiden Jokowi seakan tak pernah henti menjadi bahan pembicaraan yang memenuhi ruang publik.

Konvergensi Simbolik Penanganan Ujaran Kebencian oleh KSP dan TKP

Terhitung sejak merambahnya dunia sosial di kalangan masyarakat Indonesia, fenomena ujaran kebencian kerap kali menjadi suatu wacana yang terkadang luput dari perhatian hukum. *Netizen* semakin menguatkan keberadaannya dengan mengumbar wacana ujaran kebencian. Kini rakyat Indonesia lebih senang berkampanye menyuarakan pendapatnya di media sosial. Dapat dilihat data sampai April 2017, total pengguna Facebook di Indonesia menempati urutan ke-empat di dunia.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pengguna Facebook di Indonesia mencapai seratus juta akun. Dalam peringkat dunia, Indonesia menempati posisi ke-empat setelah Amerika, India, dan Brazil. Bahkan jika dibandingkan dengan total pengguna Facebook di Amerika, hanya berjarak 5% dari jumlah total pengguna akun.

Jika kitalihat media sosial kita saat ini memang dapat dikatakan sangat jauh dari kata santun. Tak sedikit *netizen* yang melakukan ujaran kebencian terhadap presiden dari sisi pribadi, atau pun keputusan yang dikeluarkan oleh presiden. Namun, banyak pula *netizen* yang melakukan pembelaan kepada presiden secara pribadi, karena merasa mulai jengah dengan akun-akun penyebar konten ujaran kebencian.

Seiring perkembangan zaman, perdebatan soal ujaran kebencian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, sampai akhirnya

pemerintah membuat aturan mengenai hal tersebut pun masih saja ada yang melakukannya sampai sekarang. Sampai akhirnya perbincangan ini sampai keranah istana, dan dijadikan suatu hal yang menurut mereka setidaknya perlu untuk ditindak-lanjuti. Akhirnya, wacana ujaran kebencian terhadap presiden Jokowi di media sosial menarik untuk diteliti, khususnya perihal penanganan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak istana. Berikut ini, beberapa analisis tulisan terkait penanganan ujaran kebencian oleh pihak istana yang tersebar di ranah publik.

No	Nama Informan	Judul Tulisan	Bahasan	Link Tulisan
1	JG	Fakta: Hanya sejak era Jokowi, PKI tiba-tiba muncul secara terang-terangan	Tulisan ini membahas mengenai tuduhan bahwa Jokowi adalah PKI dan akan meminta maaf pada PKI	https://www.facebook.com/jonru.page
2	RMNS	Pemerintah paksa barang haram ke anak-anak	Tulisan ini membahas persoalan pemerintah tak akan mampu tanggung dosa atas haramnya vaksin MR.	https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2004475046250113&id=10000629114174
3	KPA	Gunung emas dikuasai asing	Tulisan ini menggambarkan bagaimana sumber emas dikuasai oleh asing	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
4	TN	Prabowo: Rupiah melemah karena indonesia dikuasai asing	Tulisan ini membahas persoalan melemahnya rupiah yang disebabkan asing telah menguasai Indonesia	https://www.gosumbar.com/artikel/serbaserbi/2018/09/09/prabowo-ekonomi-melemah-karena-kita-dikuasai-asing/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
5	MI	Kini, pekerja Cina semakin bernapas lega di bumi pertiwi ini	Tulisan ini menyampaikan banyaknya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia bahkan melebihi tenaga Kerja Indonesia	https://www.facebook.com/permalink

Tabel 1. Sampel Ujaran Kebencian di Facebook

Sumber: Facebook.com

No	Nama Informan	Judul Tulisan	Bahasan	Link Tulisan
1	KSP	Presiden Jokowi: Pemerintah tidak akan minta maaf pada pki	Tulisan ini membahas mengenai keputusan pemerintah yang tidak akan meminta maaf pada PKI	http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-pemerintah-tidak-akan-minta-maaf-pada-pki.html
2	KSP	Vaksin MR diperbolehkan, bahkan wajib	Tulisan ini membahas soal diperbolehkannya vaksin MR	http://presidenri.go.id/berita-aktual/darurat-danberbahaya-vaksin-mrdiperbolehkan-bahkan-wajib.html
3	KSP	Perjuangan mengambal alih blok tambang	Artikel ini menggambarkan bahwa presiden Jokowi sadar akan banyaknya perusahaan tambang Indonesia yang dikuasai asing, jadi beliau merebutnya kembali	http://presidenri.go.id/berita-aktual/perjuangan-mengambil-alih-pengelolaan-blok-tambang.html
4	KSP	Rupiah sempat tertekan, krisis ekonomi 1998 tak akan terulang	Artikel ini membahas soal menurunnya nilai tukar rupiah, namun dipastikan kejadian 1998 tidak akan terulang	http://www.ksp.go.id/rupiah-sempat-tertekan-krisis-ekonomi-1998-tak-akan-terulang/index.html
5	KSP	Bahas Rakor TKA, Moeldok: rumor serbuan pekerja tiongkok tak terbukti	Tulisan ini adalah suatu bentuk klarifikasi bahwa jumlah TKA yang ada di Indonesia khususnya Morowali tidak sebanyak yang dibicarakan	http://ksp.go.id/bahas-rakor-tka-moeldok-rumor-serbuan-pekerja-tiongkok-tak-terbukti/

Tabel 2. Kontra Narasi oleh Kantor Staf Presiden di Facebook

Sumber: KSP.go.id

1. Kontra Narasi Ujaran Kebencian oleh Kantor Staf Presiden

Guna memudahkan analisis tulisan tersebut peneliti bedah dengan mengikuti alur FTA yakni di mulai dari initial *basic concept*. Istilah ini merupakan bagian komunikasi primer yang mewakili ke seluruh konsep dalam teks dan perbincangan. Pola penanganan yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden melalui *platform website* dapat dilihat sebagai salah satu strategi komunikasi yang apik dan mapan dengan menanggapi isu yang meluap secara cepat dan akurat. Menurut Estaswara et al., (2010) *strategic communication* dapat didefinisikan sebagai:

“Proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh aktor-aktor komunikasi (individu, kelompok dan organisasi), internal maupun eksternal, dalam rangka saling memahami untuk bekerjasama mencapai tujuan organisasi.” Strategi komunikasi yang dijalankan oleh KSP akan dianalisa lebih dalam menggunakan teori konvergensi simbolik, di mana terdapat empat istilah yang masuk ke dalam konsep dasar yakni tema fantasi, tipe fantasi, *symbolic cue*, dan *saga*.

a. Analisis Tulisan Pertama: Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf Pada PKI

Tulisan ini di *posting* pada 30 Juni 2016. Dalam tulisan ini penulis (Kantor Staf Presiden) memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak ada niat untuk meminta maaf pada keluarga Partai Komunis Indonesia, karena PKI dianggap sebuah ancaman, bukan hal yang harus dilindungi.

1) Tema Fantasi

Tema fantasi pada tulisan ini dapat kita lihat pada tema besar yang diusung oleh penulis yaitu: “Pemerintah tidak akan minta maaf pada PKI.” Penulis mencoba membangun opini kepada publik dan berupaya berbagi kesadaran bahwa Presiden tidak akan melakukan upaya untuk meminta maaf kepada PKI.

2) *Symbolic Cue*

Dalam tulisan ini, bentuk *symbolic cue* dapat diamati pada kalimat: “Tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya minta maaf pada PKI.” Dalam konteks ini, yang dimaksud oleh penulis adalah Jokowi sendiri yang sudah menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin Negara menyatakan sikap bahwa pemerintah Republik Indonesia, tidak pernah berencana untuk meinta maaf pada PKI. Berikut penggalan artikel dari KSP (Presidenri.go.id):

“Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada PKI. “Tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya minta maaf pada PKI,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama Keluarga Besar TNI di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.”

3) Tipe Fantasi

Tipe fantasi yang digunakanya itu menegaskan

kan tentang sikap pemerintah. Penulis mencoba memberikan gambaran bahwa beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI adalah dengan mempertegas sikap pemerintah terhadap PKI ke Ormas dan tokoh masyarakat setempat, agar tidak mudah terbawa isu negatif dan tidak benar. Hal ini bisa ditemukan dalam penggalan artikel berikut (Presidenri.go.id):

"Presiden menegaskan bahwa dirinya sering kali menegaskan tentang sikap pemerintah ini, baik kepada ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan juga tokoh-tokoh masyarakat. "Terutama saat Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tahun lalu. Tapi ada yang goreng-goreng sehingga muncul isu. Jangan didengarkan. Tidak akan minta maaf pada PKI," ujar Presiden."

4) Saga

Dalam tulisan ini saga dapat kita temukan dalam kalimat berikut: "kita harus jadi bangsa yang siap berkompetisi." Berikut penggalan kalimatnya (Presidenri.go.id):

"Saat ini, lanjut Presiden, hal yang paling penting adalah bagaimana melangkah ke depan, meski tidak dipungkiri ada masa kelam pada masa lalu. "Agar menyongsong masa depan lebih baik dan peristiwa tidak terjadi lagi, maka kita harus jadi bangsa yang siap berkompetisi," kata Presiden."

Dalam saga ini, penulis seperti memberikan titik terang bahwa agar kejadian pembantaian oleh PKI bisa dijadikan pelajaran untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Satu hal yang dapat dicegah agar peristiwa tersebut tidak terulang adalah, bangsa Indonesia harus siap berkompetisi dengan negara lain di belahan dunia.

b. Analisis Tulisan Kedua: Darurat dan Berbahaya, Vaksin MR Diperbolehkan, Bahkanwajib.

Tulisan yang dibuat oleh Kantor Staf Presiden ini diterbitkan pada 22 September 2018. Tulisan ini termasuk salah satu penanganan Kantor Staf Presiden terhadap ujaran kebencian terhadap presiden Jokowi di Facebook.

1) Tema Fantasi

Tema fantasi mewujudkan sebuah pesan dramatis yang menggambarkan sebuah kasus yang menjelaskan keadaannya. Dalam

konteks tulisan ini tema fantasi yang diangkat adalah "Vaksin MR diperbolehkan bahkan wajib." Tema fantasi Vaksin MR diperbolehkan bahkan wajib ini menjadi semacam tema besar yang ingin disampaikan oleh penulis. Tema untuk menunjukkan bahwa vaksin MR kini diperbolehkan, bahkan wajib karena hal yang darurat.

2) Symbolic Cue

Dalam tulisan ini *symbolic cue* terdapat pada tulisan: Fatwa. Berikut penggalan kalimat tersebut (Presidenri.go.id):

"Sebenarnya, menurut Ketua MUI, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016. Itu fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib. "Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, merupakan kewajiban," jelas Ma'ruf Amin.

Kata fatwa, intinya penulis menilai bahwa status vaksin MR yang selama ini diyakini masyarakat adalah haram, sudah ada landasan yang jelas dan keputusan dari MUI bahwa vaksin tersebut diperbolehkan bahkan diwajibkan karena keadaan darurat.

3) Tipe Fantasi

Dalam tulisan ini tipe fantasi ada pada kalimat: MUI sudah mengeluarkan dua fatwa. Karena itu, Ketua MUI Ma'ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hingga saat ini baru mencapai 48 persen.

"Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini," pungkas Ma'ruf Amin (Presidenri.go.id). Penulis seolah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dalam kasus ini, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penentuan halal dan haram, menyatakan bahwa avaksin MR diperbolehkan bahkan wajib.

4) Saga

Bentuk saga dapat ditemukan dalam kalimat:

Rubella ini sangat berbahaya. Kalimat tersebut menegaskan bahwa virus rubella sangat berbahaya dan mengancam keselamatan para peneurus bangsa. Berikut penggalan kalimat tersebut (Presidenri.go.id):

“Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ulas Ma’ruf Amin.

c. Analisis Tulisan Ketiga: Perjuangan Mengambil Alih Blok Tambang

Tulisan ini dibuat oleh Kantor Staf Presiden, yang diterbitkan pada 8 Agustus 2018. Tulisan ini diberitakan kepada khalyak demi memberikan kontra narasi terhadap pencemaran nama baik Presiden Jokowi yang terkait dengan perusahaan tambang dikuasai oleh perusahaan Asing.

1) Tema Fantasi

Dalam tulisan ini tema fantasi yang menonjol ada pada kalimat: “Perjuangan mengambil alih blok asing.” Berdasarkan kalimat di atas, penulis berupaya membangun opini kepada publik bahwa pemerintah telah berupaya merebut beberapa perusahaan tambang di Indonesia yang dikuasai oleh asing.

2) *Symbolic Cue*

Tulisan ini menampilkan bentuk *symbolic cue* yang bisa dibaca pada kalimat: Pemerintah mengambil langkah serius. Berikut penggalan kalimatnya (Presidenri.go.id):

Pemerintah mengambil langkah serius terhadap upaya penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas. Beberapa aset yang berhasil diambil alih pengelolannya oleh Indonesia, antara lain Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas), Mahakam di Kalimantan Timur dan yang terbaru Blok Migas Rokan di Riau.

“Blok Mahakam dulu dimiliki Prancis dan Jepang, 100 persen sekarang kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan dulu dikelola Chevron, Amerika, sekarang sudah diambil oleh Pertamina 100 persen juga,” kata Presiden saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

Kalimat ini mencoba menceritakan kepada publik bahwa pemerintah benar-benar memikirkan cara dan melakukan segenap upaya untuk merebut saham perusahaan tambang milik asing.

3) Tipe Fantasi

Tipe fantasi yang menonjol yaitu: Indonesia nantinya dapat meningkatkan kepemilikan saham Freeport. Intinya penulis menuturkan bahwa pemerintah mengupayakan agar Indonesia nantinya dapat merasakan hasil yang menguntungkan dari proses bagi hasil saham Freeport. Hal tersebut bisa kita amati dalam tulisan: Upaya panjang tersebut pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan awal di mana Indonesia nantinya dapat meningkatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen.

Meski demikian, kesepakatan awal tersebut justru sempat menuai nada sumbang dari sejumlah pihak dari dalam negeri. Menurut Presiden, langkah penting ini seharusnya didukung penuh sebagai bagian dari mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya. “Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul bisa dikelola oleh bangsa ini,” tandasnya.

4) *Saga*

Dalam tulisan ini bisa diperhatikan pada kalimat: bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia dari Freeport. Penulis menunjukkan bahwa upaya pemerintah masih terus-menerus dilakukan agar Indonesia dapat memiliki seutuhnya saham perusahaan tambang yang ada di wilayah Indonesia.

Selain itu, kepala negara juga mengabarkan upaya yang masih ditempuh pemerintah untuk dapat mendapatkan bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia dari Freeport. “Freeport, wah ini memang sulit banget,” ucapnya. Menurut Presiden, selama 40 tahun rakyat Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen dari Freeport Indonesia. Karena itu, pihaknya dalam 3,5 tahun belakangan ini masih terus mengupayakan negosiasi soal divestasi saham Freeport ini.

“Saya negosiasi 3,5 tahun, alot sekali. Jangan dipikir itu mudah. Saya sampaikan, Jangan mundur! Minta mayoritas 51 persen. Ditawar 30 persen tidak boleh, 51 persen mayoritas!” tuturnya.

d. Analisis Tulisan Ke-Empat: Rupiah Sempat Tertekan Isu Ekonomi 1998, Tak Akan Terulang Tulisan yang di-posting pada 7 September 2018.

Tulisan ini menarik dikaji dalam kaitannya kontra narasi Kantor Staf Presiden mengenai isu menurunnya nilai tukar rupiah.

1) Tema Fantasi

Dalam tulisan ini tema fantasi yang menonjol terlihat dari tema besar yang diangkat oleh penulis, yaitu: Mata uang rupiah sempat tertekan oleh dollar AS. Meskipun mata uang rupiah sempat tertekan oleh Dolar AS, krisis ekonomi seperti tahun 1998 diyakini tidak akan terjadi. Penegasan itu disampaikan Deputy Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari.

“Semua pembicara sudah sama poinnya bahwa kondisi sekarang berbeda dengan tahun 1998. Kita tidak akan seperti 1998, tetapi memang kita semua harus melakukan penyesuaian dan pemerintah makin mawas diri. Pemerintah tidak pernah menganggap depresiasi rupiah tidak serius,” tegas Denni (KSP.go.id).

Dari tema fantasi yang dibagikan oleh penulis kepada pembaca ini adalah gambaran sebuah kasus. Persoalan yang kini meluap adalah soal nilai tukar rupiah yang tertekan oleh Dolar AS.

2) Symbolic Cue

Bentuk *symbolic cue* bisa terlihat jelas pada kata: Terpuruk. Dalam konteks ini, persoalan mengenai nilai tukar rupiah yang melemah bukan berarti menyebabkan kondisi ekonomi terancam. Keyakinan Indonesia tak akan terpuruk seperti tahun 1998 ini juga diamini oleh para pembicara lain, yakni mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, politisi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo dan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Ari Kuncoro.

3) Tipe Fantasi

Berikut ini tipe fantasi yang bisa ditelaah dalam kontra narasi yang dibuat oleh Kantor Staf Presiden adalah: kondisi ekonomi saat ini lebih disebabkan karena faktor eksternal yaitu kebijakan Bank Sentral AS. Intinya kondisi ekonomi yang terjadi sekarang lebih banyak disebabkan karena faktor eksternal, yaitu kebijakan Bank Sentral AS.

Denni menyatakan (KSP.go.id), penjelasan dari pemerintah sudah cukup proporsional, bahwa kondisi ekonomi pada saat ini lebih disebabkan karena faktor eksternal yaitu kebijakan Bank Sentral AS yang menaikkan tingkat suku bunga ditambah dengan kebijakan fiskal Presiden Donald Trump yang sangat ekspansif yang menyebabkan defisit fiskal AS melebar, yang ditutup dengan penerbitan surat utang dengan suku bunga yang lebih tinggi. Akibat dari kebijakan moneter dan fiskal AS ini, modal mengalir dari *emerging market* termasuk Indonesia ke AS. Permintaan dolar pun naik, harga dolar naik. Menurut doktor ekonomi lulusan University of Colorado itu, di samping sebab eksternal pemerintah juga telah menyampaikan masalah ekonomi domestik kita yakni defisit neraca transaksi berjalan sebagai penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Namun ini bukanlah hal baru. Defisit neraca transaksi berjalan sudah terjadi sejak 2012, bahkan pernah mencapai lebih dari 4% di masa lalu. “Penyebab dari defisit ini adalah produktivitas kita yang rendah, yang menyebabkan kita tidak memiliki daya saing untuk mengekspor,” katanya.

4) Saga

Saga bisa ditemukan pada kalimat: Bergantung pada Dolar AS. Dalam hal ini penulis seakan menekan kepada pembaca bahwa kondisi perekonomian memang disebabkan oleh mata uang Dolar AS yang memiliki kekuasaan tinggi. Kenapa kita bergantung pada Dolar AS, Denni menjelaskan bahwa dalam perdagangan global, mata uang Dolar AS sering berperan sebagai “*vehicle currency*”. “Itu adalah mata uang yang disepakati oleh

penjual dan pembeli ketika melakukan perdagangan atau pembayaran internasional,” ungkap Denni.

e. **Analisis Tulisan Kelima: Bahas Rakor TKA, Moeldoko: Rumor Serbuan Pekerja Tiongkok Tak Terbukti**

Dalam tulisan ini di-*posting* pada 7 Agustus 2018. Paparan artikel ini menuliskan tentang tenaga kerja asing yang rumornya membludak di Indonesia.

1) Tema Fantasi

Tema fantasi menunjukkan pesan yang menggambarkan sebuah karakter pada kasus yang diperjelas oleh keadannya. Dalam konteks ini gambaran sebuah kasus yang diusung oleh kantor staf presiden bisa dilihat pada tema pokok yang dibuat, yaitu: serbuan pekerja Tiongkok tak terbukti. Jika dilihat tema tersebut sudah jelas menggambarkan bahwa isu banyaknya tenaga kerja Tiongkok di Indonesia tidak benar.

2) *Symbolic Cue*

Symbolic cue ada pada tulisan: Hantaman isu tenaga kerja asing seperti gelombang yang tak pernah usai. “Hantaman isu tenaga kerja asing ini seperti gelombang yang tak pernah selesai. Untuk itu, sore ini kita hadirkan semua sektor terkait ketenagakerjaan. Juga ada teman-teman wartawan di lokasi, agar bisa menjelaskan langsung apa yang sebenarnya terjadi,” kata Moeldoko membuka pertemuan. Dalam konteks ini intinya menggambarkan bahwa persoalan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia seperti tidak pernah ada habisnya.

3) Tipe Fantasi

Tipe fantasi yang dibagikan penulis yaitu pada kalimat: Tak terlihat ada TKA Tiongkok berkeliaran. Hal ini bisa diperhatikan pada kalimat: Para jurnalis ini pun “blusukan” hingga ke kantin, fasilitas kesehatan, tempat tinggal atau *mess*, serta politeknik. “Tak terlihat ada TKA Tiongkok berkeliaran. Menu makanan pun kami datangi hingga ketempat penyimpanannya. Semua halal. Ayam, sayur. Tak ada babi yang dikonsumsi oleh TKI,” urai David.

Sementara itu, Kartika menjelaskan, di IMIP total ada 3.121 TKA, sementara jumlah pekerja lokal mencapai 25.447 orang. “Total TKA hanya 10,9 persen dari keseluruhan pegawai di kawasan ini,” papar Kartika. KSP mencoba memperjelas persoalan isu tenaga kerja asing dibuktikan dengan ucapan para jurnalis yang terjun langsung di sana dan mengatakan bahwa pekerja Tiongkok tidak sebanyak yang dirumorkan.

Pembahasan

Setiap artikel yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden mencerminkan berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai isu yang relevan dengan kepentingan publik dan kebijakan nasional. Dengan menggali lebih dalam pada setiap topik, kita dapat memahami konteks, tujuan, dan dampak dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Tulisan dengan judul "Presiden Jokowi: Pemerintah tidak akan minta maaf pada PKI" menyoroti sikap tegas pemerintah terkait sejarah yang sensitif terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan menolak untuk meminta maaf kepada PKI, pemerintah menegaskan posisinya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak memberikan pengakuan atau legitimasi terhadap entitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai negara dan ideologi yang berlaku.

konteks sejarah Indonesia, PKI memiliki peran yang sangat kontroversial, terutama terkait dengan peristiwa 1965 yang menyebabkan jatuhnya Orde Lama. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak meminta maaf kepada PKI dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menegaskan kedaulatan politik pemerintah terhadap narasi sejarah nasional. Dengan menolak untuk meminta maaf, pemerintah dapat dianggap memperkuat legitimasi ideologisnya di mata masyarakat yang menolak ideologi komunis. Secara keseluruhan, tulisan tersebut menggambarkan kompleksitas dalam penanganan sejarah yang sensitif oleh pemerintah, serta menyoroti

peran penting politik dan ideologi dalam membentuk kebijakan publik. Meskipun keputusan tersebut dapat dipahami sebagai langkah untuk mempertahankan stabilitas politik, namun penting untuk terus membuka dialog dan diskusi terbuka mengenai masa lalu yang kontroversial demi mencapai rekonsiliasi dan persatuan nasional yang lebih luas.

Artikel yang membahas mengenai "Vaksin MR diperbolehkan, bahkan wajib" menggambarkan langkah-langkah proaktif pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Dengan mengizinkan dan bahkan mewajibkan vaksinasi *Measles-Rubella* (MR), pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit menular. Langkah ini juga mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan kesehatan yang berkembang, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Langkah-langkah tersebut dapat dipahami sebagai strategi pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengambil tindakan preventif yang efektif untuk melawan penyakit menular. Selain itu, keputusan untuk mewajibkan vaksinasi MR juga mengindikasikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap program imunisasi yang telah ditetapkan.

Konteks yang lebih luas, artikel ini mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam mempromosikan kesehatan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat diinterpretasikan sebagai langkah preventif untuk mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi, sehingga memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan vaksinasi yang diwajibkan juga dapat menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan, seperti perdebatan tentang kebebasan individual dan hak-hak kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan komunikasi efektif dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi

dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan

Tulisan mengenai "Perjuangan mengambil alih blok tambang" menggambarkan upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam negara secara optimal. Dengan menyadari dominasi perusahaan tambang asing di Indonesia, Presiden Jokowi berusaha untuk merebut kembali kendali atas blok tambang tersebut. Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kontrol dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam, serta upaya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Upaya pemerintah dalam mengambil alih blok tambang tersebut juga menunjukkan dorongan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Dengan memiliki kendali penuh atas blok tambang, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi hasil tambang untuk kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, langkah ini juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Dengan mengambil alih kendali atas blok tambang, pemerintah menegaskan kemandirian ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada investasi dan teknologi asing. Langkah-langkah ini sesuai dengan visi pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor tambang dalam negeri serta meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun langkah-langkah ini dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam mengelola sumber daya alam, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dan transparansi dalam mengelola sumber daya alam adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor tambang dapat dirasakan secara merata

oleh seluruh rakyat Indonesia, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Artikel "Rupiah sempat tertekan, krisis ekonomi 1998 tak akan terulang" membahas perubahan dalam nilai tukar rupiah dan keyakinan pemerintah bahwa krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998 tidak akan terulang. Dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah berusaha untuk membangun kepercayaan dan ketahanan ekonomi nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor, serta menghindari kemungkinan terulangnya krisis ekonomi masa lalu. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menegaskan keyakinan ini mencerminkan upaya serius dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Stabilitas ini sangat penting bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyampaikan keyakinan bahwa krisis ekonomi masa lalu tidak akan terulang, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mengalokasikan modalnya di pasar keuangan Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga mencerminkan respons proaktif pemerintah terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti intervensi pasar atau kebijakan moneter yang memadai, pemerintah berusaha untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa stabilitas ekonomi adalah proses yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang berke-

lanjutan dan inklusif, sambil tetap mengurangi risiko terjadinya krisis ekonomi yang merugikan bagi masyarakat luas

Sementara artikel yang mengangkat isu "Rakor TKA, Moeldoko: rumor serbuan pekerja Tiongkok tak terbukti" adalah suatu klarifikasi terhadap spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya di Morowali. Dengan memberikan klarifikasi yang akurat dan transparan, pemerintah berupaya untuk mengatasi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin timbul dari isu-isu yang berkembang. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya, serta upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dalam negeri.

Pada sebuah artikel yang membahas isu "Rakor TKA, Moeldoko: rumor serbuan pekerja Tiongkok tak terbukti", terjadi klarifikasi penting terkait dengan spekulasi yang meluas di kalangan masyarakat mengenai jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya di wilayah Morowali. Klarifikasi yang diberikan oleh pemerintah dalam konteks ini bertujuan untuk menanggapi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin muncul akibat isu-isu yang terus berkembang di media sosial dan di kalangan masyarakat umum.

Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan memberikan klarifikasi yang jelas dan tepat terkait jumlah TKA di wilayah tertentu, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di dalam negeri. Sehingga, klarifikasi tersebut juga berpotensi membantu menghindari potensi ketegangan sosial atau konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan informasi. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan respons pemerintah yang responsif dan proaktif terhadap isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan pu-

blik dan mengatasi kekhawatiran atau kesalahpahaman yang mungkin muncul.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa klarifikasi tersebut juga harus didukung oleh data yang akurat dan bukti yang kuat. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi terkini yang berkaitan dengan keberadaan TKA di Indonesia. Hal ini termasuk melakukan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi terkait dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kebijakan terkait ketenagakerjaan dan imigrasi dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat terus memperkuat kredibilitasnya dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia.

SIMPULAN

Saat menangani ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Tim Komunikasi Presiden dan Kantor Staf Presiden melakukan berbagai cara. *Pertama*, Tim Komunikasi Presiden bertindak sebagai pemberi nasihat kepada presiden mengenai apa yang harus dilakukan oleh presiden ketika diterpa oleh ujaran kebencian. *Kedua*, jika memang ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden tidak bersifat krusial, Tim Komunikasi Presiden, khususnya Johan Budi memberikan klarifikasi dihadapan para media. *Ketiga*, ketika ujaran kebencian sudah mulai menyebar ke setiap lapisan masyarakat, biasanya Tim Komunikasi Presiden berdiskusi dengan Kantor Staf Presiden dan lembaga kementerian terkait untuk merumuskan solusi yang harus dilakukan. Lain halnya dengan Kantor Staf Presiden. Dalam memecahkan persoalan ujaran kebencian yang menerpa Presiden, dan biasanya bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk turut mendiseminasikan narasi yang dibuat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setidaknya peneliti memiliki serangkaian saran yang bisa diimplementasikan baik oleh Tim Komunikasi Presiden atau pun Kantor Staf Presiden, diantaranya memiliki pusat koordinasi

komunikasi di lingkungan istana. Sehingga istana bisa memiliki narasi tunggal dalam menjawab isu yang berkembang, serta berperan aktif dalam mendiseminasikan narasi tunggal, sehingga nantinya publik tidak mudah terkecoh oleh isu yang narasi ganda di lingkungan istana. Ada baiknya kajian seputar ujaran kebencian terus dikembangkan. Riset mengenai ujaran kebencian dapat ditindaklanjuti salah satunya dengan meneliti keberhasilan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menjaga citra dan membangun narasi tunggal untuk mengendalikan opini publik. Sehingga dapat meminimalisir ujaran kebencian yang bertebaran di media sosial.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Diantaranya, penelitian ini hanya focus membahas seputar ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai pimpinan Negara sehingga dengan segala keterbatasan peneliti hanya dapat menyuguhkan beberapa contoh kasus ujaran kebencian dan penanganan yang dilakukan oleh Tim Komunikasi Presiden dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfin, A. (2011). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Arikunto, S., Suharjono, & Supardi. (2006). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boorman, E. (n.d.). *Symbolic Convergence Theory: A Communication Formulation*. <https://Academia.oup.com>.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Yvonna S. Lincoln. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. New York: SAGE Publications, Inc.
- Effendi, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffin, E. (2003). *A First Look at Communication*. New York: McGraw Hill.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Estaswara, H., Halim, U., Burhan, A.B. (2020). Memaknai Strategic Communication. *Coverage*, 11(1), 1-10.
- Estaswara, H. (2011). Corporate Cyber-Crisis: A Case Study of Omni International Hospital in Indonesia. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 7(8), 878-890.
- Heryanto, G. G. (2016). *Diskurs Islam Nusantara di Media Sosial*. Jakarta: Laswell Visitama.
- Heryanto, G. G. (2018). *Problematika Komunikasi Poltik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Heryanto, G., Wahyudin, A., Zamroni, M., Ali, M., Sanuantari, M., & Juniawati. (2017). *Melawan Hoax Di Media Sosial dan Media Massa*. Yogyakarta: Trusmedia Publishing.
- Hidayah. (2004). *Budaya Islam: Tahlil*. Jakarta: PT. Variapop Group.
- Houben, R. (n.d.). *Netizens and Communication: A New Paradigm*. www.columbia.edu.
- Moeloeng, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budyaa dan Sioteknologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktariana, P., & Soemantri, N. P. (2016). Interaktivitas Website Di Biro Humas Dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *CoverAge*, 7(1), 69-81.
- Santoso, E. (2016). Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 88-94.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- <https://apjii.or.id> diakses pada Rabu, 21 Maret 2017
- <https://nasional.kompas.com/> Yoga sukmana. Ujaran Kebencian Dan Dua Sisi Media Sosial, di akses pada 27 Maret 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses pada Senin, 16 April 2018
- Rubrik.okezone.com. Diakses pada 13 Mei 2018. <http://www.cnnindonesia.com> diakses pada 17 Mei 2018 ksp.go.id
- Presidenri.go.id
<https://www.facebook.com/jonru.page>
- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004475046250113&id=100000629114174
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
- https://www.gosumbar.com/artikel/serbaserbi/2018/09/09/prabowo-ekonomi-melemah-karena-kita-dikuasai-asing/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
- <https://www.facebook.com/permalink>.

<http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-pemerintah-tidak-akan-minta-maaf-pada-pki.html>

<http://presidenri.go.id/berita-aktual/darurat-dan-berbahaya-vaksin-mr-diperbolehkan-bahkan-wajib.html>

<http://presidenri.go.id/berita-aktual/perjuangan-mengambil-alih-pengelolaan-blok-tambang.html>

<http://www.ksp.go.id/rupee-empat-tertekan-krisis-ekonomi-1998-tak-akan-terulang/index.html>

<http://ksp.go.id/bahas-rakor-tka-moeldoko-rumor-serbuan-pekerja-tiongkok-tak-terbukti/>